



## MENGUKUR EFEKTIVITAS ALUN-ALUN DEMOKRASI

Ahmad Budiman\*)

### Abstrak

*Alun-Alun Demokrasi merupakan tempat yang nyaman dan aman bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya di DPR RI. Alun-alun ini adalah salah satu tempat atau media yang memungkinkan proses komunikasi dua arah berlangsung secara efektif. Hal terpenting dari proses komunikasi yang berlangsung di Alun-alun Demokrasi sesungguhnya terletak pada tindak lanjut aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan Dewan atau Anggota DPR RI secara individual.*

### Latar Belakang

Pascareformasi 1998, proses demokrasi di tanah air telah tumbuh dan berkembang dalam praktek semua kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek yang terkait dengan itu adalah dijaminnya kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasi. Namun demikian, sayangnya di Indonesia hal ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi lebih banyak dilakukan di tempat-tempat umum, seperti bunderan Hotel Indonesia, di depan Istana Negara, dan di depan pagar Gedung DPR RI. Hal ini lebih sering berdampak pada kerugian bagi masyarakat seperti kemacetan lalu lintas dan rusaknya berbagai fasilitas umum, serta berpotensi menimbulkan tindakan anarkis dan konflik.

Berkaitan dengan kondisi ini, Pimpinan DPR RI telah meresmikan rencana pembangunan Alun-alun Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan. Alun-alun ini akan dibangun di sisi kiri Kompleks Parlemen yang saat ini dijadikan sebagai Taman Rusa, lapangan futsal, dan tempat parkir kendaraan. Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, sebagai Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR RI, menjelaskan pembangunan Alun-alun ini sangat penting bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Selama ini, masyarakat tidak memiliki ruang-ruang khusus untuk melakukan aksi demonstrasi. Aksi-aksi tersebut lebih sering digelar di ruang-ruang publik yang pada akhirnya akan mengganggu kenyamanan. Dengan demikian, pembangunan Alun-alun Demokrasi ini akan memungkinkan kegiatan demonstrasi dapat lebih tertata tanpa

\*) Peneliti Madya Komunikasi Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: a.budiman69@gmail.com



menyebabkan gangguan kenyamanan. Yang tidak kalah penting, rakyat dengan DPR akan semakin dekat.

Tanggapan masyarakat dan media massa mengenai rencana pembangunan Alun-alun Demokrasi pasti beragam. Untuk itu DPR RI telah mengundang masyarakat berpartisipasi menyampaikan aspirasi terkait dengan rencana pembangunan Alun-alun Demokrasi melalui menu “Kirim Aspirasi” di *website* DPR RI, SMS Aspirasi DPR RI 08119443344 atau akun *Twitter* resmi DPR RI @dpr\_ri dengan hastag #alunalundemokrasi. Komentar masyarakat dan media massa terkait rencana pembangunan Alun-alun Demokrasi, di antaranya, yaitu:

- Di dalam negara demokrasi fasilitas ini sangatlah penting, dengan adanya Alun Alun Demokrasi ini siapa pun warga negara Indonesia akan bisa menyampaikan aspirasi dengan nyaman dan petugas pun mudah menertibkan, juga tanpa mengganggu lalu lintas, *Good Work* DPR.
- Agar DPR bisa melihat dan mendengar lebih dekat
- Demonstrasi sesungguhnya bukan sekadar cara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat semata. Kuncinya, terletak kepada para penguasa dalam hal ini Anggota Dewan selaku wakil rakyat dan juga Pemerintah.
- Pada era internet ini, bahkan sudah ada situs *web* yang khusus untuk menyampaikan petisi. Orang bisa menandatangani petisi dengan cara mengklik situs itu sambil minum kopi di rumah masing-masing.
- Alun-alun Demokrasi penting, tapi tidak mendesak.

## Mengukur Efektivitas

Beragamnya tanggapan masyarakat dan media massa mengenai rencana pembangunan Alun-alun Demokrasi di DPR RI, sesungguhnya menuntut kita untuk mengukur efektivitas Alun-alun Demokrasi secara lebih lengkap dari berbagai tinjauan, termasuk urgensi pembangunannya.

Aspirasi masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam rangka penguatan lembaga legislatif sebagai pilar demokrasi. Untuk itu aspirasi masyarakat perlu dilindungi dan difasilitasi agar kebebasan

masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dapat terlaksana dengan baik, tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain, dan potensi tindakan anarkis lainnya. Alun-alun Demokrasi adalah plaza reformasi bagi publik. Sebagai tempat yang disiapkan khusus untuk menyatakan pendapat dan perasaan masyarakat. Pelaksanaan demonstrasi di Alun-alun Demokrasi ini sangat dilindungi sebagai mimbar kebebasan berpendapat yang aman dan damai tanpa kerusuhan dan ketegangan dengan aparat.

Ukuran berikutnya ditinjau dari aspek komunikasi. Prinsip komunikasi yang dibangun di Alun-alun Demokrasi adalah pola komunikasi dua arah (*a two-ways communication*) antara komunikator dan komunikan. Alun-alun Demokrasi adalah tempat di mana DPR RI dan masyarakat (komunikator dan komunikan) berdialog mengenai aspirasinya, sehingga menimbulkan kesepahaman bersama. Hal ini sejalan dengan paradigma efektivitas komunikasi karena proses komunikasi akan berlangsung efektif, apabila komunikator dan komunikan memiliki kesepahaman terhadap isu yang dibicarakannya (model komunikasi *ABX Newcomb*).

Ukuran efektivitas berikutnya terkait dengan perencanaan tempat Alun-alun Demokrasi. Sebagai tempat berlansungnya proses komunikasi dua arah antara masyarakat yang menyampaikan aspirasinya kepada DPR RI, pembangunan Alun-alun ini harus memiliki kriteria area luas yang dilindungi, aman dan nyaman untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya. Namun demikian, akses menuju dan keluar Alun-alun Demokrasi pun tetap perlu dibedakan dan dilindungi dengan akses menuju dan keluar DPR RI.

Pada Alun-alun Demokrasi perlu ditempatkan panggung utama sebagai titik fokus untuk masyarakat menyampaikan aspirasi dan didukung dengan tempat duduk yang nyaman bagi peserta mendengarkan proses dialog penyampaian aspirasi. Alun-alun Demokrasi juga perlu memiliki area tanah lapang yang asri yang berhadapan dengan panggung utama untuk masyarakat mengikuti penyampaian aspirasi. Khusus untuk Anggota Dewan, perlu tersedia jalur khusus Anggota DPR RI untuk dapat menuju Alun-alun Demokrasi. Selain itu Alun-alun Demokrasi wajib memiliki jalur evakuasi

khusus bila terjadi kerusuhan di area Alun-alun Demokrasi. Area Alun-alun Demokrasi berada tidak jauh dari tempat parkir, guna mencegah terjadinya kemacetan di sekitar lokasi.

Mengukur efektivitas Alun-alun Demokrasi juga dapat diukur dari fasilitas yang berada di dalamnya. Alun-alun Demokrasi sebagai tempat di mana proses komunikasi wajib dilakukan dua arah, perlu difasilitasi dengan layar lebar sebagai alternatif media komunikasi interaktif masyarakat dengan DPR RI. Tata suara dan tata cahaya juga perlu mendukung kegiatan.

Pada Alun-alun Demokrasi juga perlu difasilitasi tempat ibadah dan toilet yang memadai. Selain itu juga perlu sediakan berbagai sarana informasi yang berguna meningkatkan pengetahuan masyarakat, seperti dinding diorama perjalanan tugas dan fungsi DPR RI sepanjang masa, paket informasi singkat seperti brosur dan leaflet, dibantu oleh petugas informasi, dan ruang informasi elektronik yang berisi berbagai kegiatan dan hasil kerja DPR RI.

Alun-alun Demokrasi sebagai tempat berkumpulnya masyarakat di DPR RI dalam jumlah banyak, perlu memperhatikan efektivitas pengelolaannya. Masyarakat yang dapat masuk ke Alun-alun Demokrasi adalah masyarakat yang sudah mendaftarkan untuk menyampaikan aspirasi. Tersedia beberapa titik masuk Alun-alun Demokrasi. Masyarakat yang masuk ke area Alun-alun ini perlu dipastikan dilarang membawa senjata tajam, miras dan obat-obat terlarang, berbagai atribut yang isinya mengandung SARA, dan cat semprot yang dapat mengotori fasilitas Alun-alun Demokrasi.

Penyampaian aspirasi masyarakat disampaikan sesuai dengan hari dan waktu yang ditentukan. Selanjutnya setelah berada di dalam Alun-alun Demokrasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi dapat melakukan komunikasi interaktif dengan Anggota/alat kelengkapan dewan (AKD) yang berada di panggung demokrasi atau berkomunikasi interaktif melalui layar lebar yang terhubung dengan Anggota DPR RI di ruang rapat. Selain itu masyarakat dapat menyaksikan jalannya rapat di DPR RI yang hasilnya ditunggu oleh masyarakat yang datang di Alun-alun Demokrasi.

Tuntutan/aspirasi dan/atau hasil pembahasan dengan Anggota DPR RI,

ditampilkan di layar lebar Alun-alun Demokrasi. Selama proses penyampaian aspirasi berlangsung, masyarakat yang menyampaikan aspirasinya di Alun-alun Demokrasi dilarang melakukan tindakan anarkis yang berujung pada terjadinya konflik. Untuk itu petugas keamanan dapat meminta keluar masyarakat yang melakukan tindakan anarkis dan menimbulkan konflik. Terakhir, apabila masyarakat yang telah selesai menyampaikan aspirasinya, dipersilahkan meninggalkan Alun-alun Demokrasi. Hal terpenting dari keseluruhan pengelolaan Alun-alun demokrasi ini adalah aspirasi yang diterima DPR RI didokumentasikan sebagai bahan rapat untuk ditindaklanjuti pada rapat-rapat AKD.

Kehadiran massa dalam jumlah banyak, menuntut diadakannya sistem pengamanan yang efektif. Pengamanan Alun-alun Demokrasi dilakukan secara terpadu antara petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) dan Aparat Kepolisian. Aparat Kepolisian melakukan pengamanan pertama di titik masuk Alun-alun Demokrasi dan Pamdal berada di dalam Alun-alun Demokrasi untuk memantau jalannya demonstrasi.

Sarana dan prasarana pengamanan untuk Alun-alun Demokrasi pun harus sesuai dengan standar pengamanan gedung lembaga negara. Setelah selesai digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, Pamdal dan Aparat Kepolisian segera melakukan sterilisasi Alun-alun Demokrasi. Selain itu, jika tidak ada masyarakat yang menyampaikan aspirasi di Alun-alun Demokrasi, pintu-pintu masuk Alun-alun Demokrasi selalu dikunci oleh Petugas Pamdal.

## Target

Tujuan pembangunan Alun-alun Demokrasi sesungguhnya adalah menyediakan wadah komunikasi yang efektif bagi masyarakat dan DPR RI dalam membahas aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat menjadi salah satu syarat dari berhasilnya parlemen menjalankan perannya untuk melakukan *checks and balances* terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah, agar senantiasa berpihak pada kebutuhan seluruh masyarakat.

Keberadaan Alun-alun ini pada akhirnya dimaksudkan untuk mempercepat

pelaksanaan tindak lanjut aspirasi masyarakat oleh DPR RI. Kondisi ini harus dicermati dengan tepat, mengingat alun-alun tersebut merupakan salah satu media pengaduan masyarakat disamping media Surat Pengaduan Masyarakat, SMS Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat secara online yang telah ada selama ini. Kehadiran Alun-alun Demokrasi justru harus lebih mempercepat tindak lanjut aspirasi masyarakat yang selama ini belum dapat dilakukan secara maksimal oleh AKD atau Anggota DPR RI. Hasil komunikasi interaktif antara masyarakat dengan DPR RI pada Alun-alun Demokrasi tinggal diperkuat dengan analisis peraturan perundang-undangan terkait, yang selanjutnya akan dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan antara DPR RI bersama Pemerintah.

## Penutup

Alun-alun Demokrasi merupakan upaya DPR RI untuk menghadirkan tempat yang disiapkan khusus untuk menyatakan pendapat dan perasaan masyarakat di DPR RI. Pelaksanaan demonstrasi di Alun-alun Demokrasi sangat dilindungi sebagai mimbar kebebasan berpendapat yang aman dan damai tanpa kerusuhan dan ketegangan dengan aparat. Menuju terwujudnya Alun-alun Demokrasi, maka beberapa hal perlu diperhatikan sebagai upaya mengukur efektivitas kehadiran Alun-alun Demokrasi, seperti urgensi, aspek komunikasi, perencanaan tempat, fasilitas, pengelolaan dan pengamanannya.

Oleh karena itu, gagasan pembangunan Alun-alun Demokrasi ini perlu terus disebarluaskan ke seluruh masyarakat. Sosialisasi tentunya berisi arti penting tempat ini dan bagaimana kebutuhan masyarakat untuk memiliki tempat menyampaikan aspirasinya dapat terpenuhi, tanpa harus mengganggu hak kenyamanan dari masyarakat lainnya.

## Referensi

- "DPR Resmikan Pembangunan Alun-alun Demokrasi", dalam <http://nasional.kompas.com/read/2015/05/21/12363751/DPR.Resmikan.Pembangunan.Alun-alun.Demokrasi>; diakses tanggal 8 Juni 2015.
- "Tentang Alun-alun Demokrasi", dalam <http://www.dpr.go.id/aspirasi/info>; diakses tanggal 8 Juni 2015.
- "Alun-alun Demokrasi, Perlukah?", dalam <http://www.mediaindonesia.com/mipagi/read/11667/Alun-alun-Demokrasi-Perlukah/2015/05/25>; diakses tanggal 8 Juni 2015.
- "Alun-alun Demokrasi", dalam <http://www.tempo.co/read/kolom/2015/05/26/2130/alun-alun-demokrasi>; diakses tanggal 8 Juni 2015.
- Pidato Pimpinan DPR RI pada peresmian Alun-alun Demokrasi, tanggal 21 Mei 2015.